

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ngada Triwulan IV 2025 sebagai berikut:

- Bulan Oktober Inflasi Kabupaten Ngada (year-on-year) sebesar 2,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,00
- Bulan November Inflasi Kabupaten Ngada (year-on-year) sebesar 2,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,55
- Bulan Desember Inflasi Kabupaten Ngada (year-on-year) sebesar 1,74 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,05

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pergerakan inflasi di Kabupaten Ngada saat ini lebih didorong oleh kenaikan beberapa komoditi strategis/*volatile food inflation* di antaranya minyak goreng dalam kemasan, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam dan barang hortikultura (bawang) serta *administered price inflation* berupa tingginya tarif angkutan udara.

Untuk Kabupaten Ngada, kondisi ini cukup berdampak dan dirasakan membebani konsumen/masyarakat namun demikian belum signifikan mempengaruhi kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Pengawasan dan pengendalian harga terus dilakukan serta diharapkan harga komoditas sebagaimana tersebut di atas tidak terus naik sehingga dalam konteks daerah tidak menggerek inflasi pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pemerintah mengatasi/mengendalikan inflasi di Kabupaten Ngada utamanya terhadap komoditi pangan dilakukan berdasarkan 4 (empat) strategi kunci meliputi:

1. Keterjangkauan harga, dengan program program strategis yakni:
2. Kestabilan harga pangan;
3. Ketersediaan pasokan, dengan program strategis yakni:
4. Penguatan dan pengawasan cadangan pangan;
5. Peningkatan produk pangan domestik;
6. Peningkatan produksi perikanan;
7. Peningkatan produksi peternakan.
8. Kelancaran Distribusi, dengan program strategis yakni:
9. Mendorong kerjasama perdagangan;
10. Meningkatkan infrastruktur perdagangan;
11. Memperbaiki pengawasan jalur distribusi produksi
12. Komunikasi efektif, dengan program strategis yakni:
13. Memperbaiki kualitas data komoditas pangan strategis;
14. Rapat koordinasi pengendalian inflasi secara kontinyu;
15. Pelaporan kegiatan pengendalian inflasi daerah

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Bulan Oktober sampai Desember 2025.

Pada prinsipnya pengendalian inflasi di daerah khususnya di Kabupaten Ngada memiliki pedoman baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui TPIP dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Ngada berupa penetapan Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2027.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Ngada, Pemerintah secara periodik melakukan:

1. Pengendalian harga/keterjangkauan harga;
2. Pengendalian produksi/ketersediaan pasokan;
3. Penguatan dari aspek supply dan distribusi;
4. Peningkatan efektivitas informasi pengendalian inflasi kepada masyarakat

Selain itu sebagai upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Ngada merujuk pada kebijakan nasional melakukan percepatan realisasi APBD bagi belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi daerah utamanya pada sasaran strategis pembangunan diantaranya kedaulatan pangan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2025-2029 melalui tagline Terwujudnya Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan II. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Catatan konstruktif terkait kebijakan pengendalian inflasi di daerah terutama dalam situasi dimana kecenderungan pergerakan ekonomi melambat adalah Pemerintah beserta stakeholder terkait melalui TPID baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Ngada secara sinergi melalui kebijakan inflasi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui:

1. Percepatan realisasi APBD bagi belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi daerah;
2. Kepastian ketersediaan produksi pangan termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian;
3. Meningkatkan peran UMKM termasuk mengoptimalkan lembaga ekonomi pedesaan atau BUMDES;
4. Penguatan rantai pasokan lokal serta mendorong peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan melalui Percepatan Akses Keuangan Daerah pada tingkat Kabupaten Ngada;
5. Mendorong peningkatan UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan.